AKUNTANSI HUMANIORA
Jurnal pengabdian Masyarakat
• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm

DESA MANDIRI MARITIM: WUJUD KETAHANAN MARITIM MELALUI PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR DI DESA PONIPINGAN, SULAWESI TENGAH

Mellisa Towadi[1], Apriyanto A.J. Pauweni[2], Julius T. Mandjo[3]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
[2]Fakutas pendidikan sains Education, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
[3]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Corresponding author: Apriyanto A.J. Pauweni
E-mail: apriyantopauweni@ung.ac.id

Info Artikel:

Dikirim: 2022-03-15	Direvisi: 2022-05-17	Diterima: 2022-06-20
Vol: 1	Number: 2	Hal: 99-107

Kata kunci: Kapasitas Desa, Desa Mandiri Maritim, Ketahanan Maritim, Desa Pesisir.

Abstrak

Kondisi eksisting desa Ponipingan sebagai desa pesisir merupakan peluang sekaligus tantangan untuk mengubah paradigma berpikir tentang konsep ketahanan laut. Paradigma yang dibangun adalah konsep ini terkait dengan aspek militer dan aspek keamanannya, bahkan dari segi pengelolaan, masyarakat desa Ponipingan kurang berminat untuk mengelola ruang laut dan hasil laut secara maksimal. Artikel ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan pengabdian berupa publikasi terkait penguatan kapasitas desa melalui pengelolaan sampah/limbah laut sebagai bentuk ketahanan bahari desa Ponipingan yang merupakan wilayah pesisir Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan konsep sistem integrasi "Desa Mandiri Maritim atau Desa Mandiri Maritim" sebagai bentuk ketahanan maritim dan metode pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Jika ditelaah secara mendalam, program-program yang dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pendidikan maritim khususnya dalam aspek hukum masih dirasa kurang karena banyak program yang dilaksanakan hanya berpusat pada bagaimana sistem administrasi kelembagaannya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemerintahan ini sangat penting, namun pendidikan maritim dan pangan di desa memiliki peran juga dalam mewujudkan pembangunan nasional. Bagaimana tidak, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa dilandasi wawasan hukum dapat turut menjerumuskan aparat desa ke dalam permasalahan hukum. Artikel disusun secara normatif kualitatif berdasarkan data dan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Rangkaian konsep ketahanan maritim tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas desa dari masyarakat hingga aparatur desa. Salah satu indikator peningkatan kapasitas desa adalah terbangunnya sistem integrasi Desa Mandiri Maritim sebagaimana tertuang dalam rancangan keputusan kepala desa Ponipingan.

Cite this as: Mellisa Towadi[1], Apriyanto A.J Pauweni[2], Julius T. Mandjo[3]. (2022). "Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah." Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 99 - 107

AKUNTANSI HUMANIORA
Jurnal pengabdian Masyarakat
• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia di desa atau identik dengan perangkat desa merupakan salah satu pendukung desa dan merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat desa dituntut memiliki kemampuan atau keterampilan, pemahaman, pengetahuan, wawasan, perilaku, sikap, nilai-nilai yang mendukung perangkat desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat desa dalam mencapai pembangunan desa itu sendiri. Apalagi diketahui bahwa desa-desa di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Ada desa yang terletak di dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pesisir. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk tidak hanya mengetahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa hanya terkait dengan pemerintahan dan program desa secara umum, tetapi juga memahami tentang kelautan. Pembangunan sumber daya manusia atau perangkat desa di bidang kelautan sangat strategis bagi Indonesia dari segi ekonomi, sosial budaya dan hukum (KKP, 2012).

Jika ditelaah secara mendalam program-program yang dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pendidikan kemaritiman khususnya dalam aspek hukum masih dirasa kurang karena banyak program yang dilaksanakan hanya berpusat pada bagaimana sistem administrasi kelembagaannya. , meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemerintahan ini sangat penting, tetapi pendidikan sangat penting. kemaritiman dan pangan di desa juga turut andil dalam mewujudkan pembangunan nasional. Betapa tidak, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak dilandasi wawasan hukum juga dapat menjerumuskan aparat desa ke dalam permasalahan hukum (WikipediaIndonesia, 2020).

Kondisi eksisting desa Ponipingan sebagai desa pesisir merupakan peluang sekaligus tantangan untuk mengubah paradigma berpikir tentang konsep ketahanan laut. Paradigma yang dikembangkan adalah konsep ini terkait dengan aspek militer dan keamanan, bahkan dari sisi pengelolaan, masyarakat Desa Ponipingan kurang berminat untuk mengelola ruang laut dan hasil laut secara optimal. Hal ini terlihat dari dominannya mata pencaharian masyarakat desa, bukan nelayan, melainkan petani (LPPM-UNG, 2022).

Desa Ponipingan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Penduduk Desa Ponipingan tahun 2022, terdiri dari 197 kepala keluarga. Desa Ponipingan merupakan desa yang cukup kecil dengan luas 267 hektar yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Liang, Dusun Pobuyoton dan Dusun Bulalo. Sebagian besar masyarakat Desa Ponipingan bekerja sebagai petani (BPSKab-Buol, 2022).

Menyikapi kondisi di atas, tentunya diperlukan kontribusi nyata untuk memperoleh beberapa konsep strategis terkait dengan strategi pendidikan maritim menuju Indonesia Unggul yang mampu menjawab tantangan nasional dan global.

METODE

Dari uraian permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tahapan program Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada pengelolaan sampah laut di desa pesisir Ponipingan melalui beberapa program diantaranya (LPPM-UNG, 2022):

a. Melakukan sosialisasi konsep ketahanan laut di desa melalui penyuluhan tentang sistem integrasi “desa mandiri” maritim” dan melalui pengelolaan sampah laut di desa Ponipingan yang orientasinya pada perubahan paradigma dalam melihat

sampah laut yang dapat dikelola di cara yang lebih baik;
b. Pembuatan papan informasi Sampah Laut dan Tempat Percontohan di Desa Poniping
c. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan batu bata yang dapat menunjang perekonomian masyarakat
d. Pelaksanaan program "Beringin Pintar" untuk anak usia dini tentang penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui potensi dan sumber daya alam yang ada di desa serta melestarikan lingkungan pesisir tempat tinggalnya.

Terkait dengan program peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui pengelolaan sampah laut berbasis ecobrick di desa Ponipingan digunakan metode sebagai berikut:(LPPM-UNG, 2022):

a. Metode survey yang akan digunakan untuk mengetahui jenis sampah dan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Ponipingan
b. sebuah. Metode pendampingan terbentuknya sistem integrasi "Desa Bahari Mandiri" adalah dengan mengklasifikasikan dan menyusun data desa berbasis online, membentuk kelompok pemuda sebagai "pemuda cinta laut" dan mengoptimalkan peran perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
c. Metode penyuluhan sekaligus sosialisasi konsep ketahanan bahari di desa Ponipingan
d. Pelatihan Ecobrick merupakan bagian dari pengelolaan sampah laut, pelatihan pengelolaan hasil pertanian menjadi jajanan bergizi tinggi untuk anak usia dini dan pelatihan sampah pertanian menjadi pupuk organik.
e. Pendidikan bagi anak usia dini melalui kegiatan best practice penanaman nilai-nilai tentang kesadaran diri akan kebersihan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Keamanan Laut di Desa. Program kemaritiman di desa merupakan salah satu program dalam Sustainable Development Goals (SDGs). TPB tidak hanya fokus pada isu-isu berkelanjutan tetapi juga isu-isu strategis nasional yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang ada dan/atau mulai di tingkat desa. Tujuan TPB maritim di desa adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan nasional ekosistem laut pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Sasaran tersebut terdiri dari penataan ruang laut dan pengelolaan kawasan laut yang berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batas biologis yang aman dan pemberantasan IUU fishing, peningkatan kawasan konservasi laut dan pemanfaatan yang berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan terhadap nelayan kecil. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.(DatakuDIY, 2020).

Konsep Desa Mandiri Maritim. Pengertian Pesisir Menurut (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001) adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. ke arah darat meliputi bagian daratan, baik yang kering maupun yang terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan resapan air asin. Sedangkan menuju laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alam yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, serta yang disebabkan oleh aktivitas manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Desa Bahari adalah desa di wilayah pesisir atau pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang

AKUNTANSI HUMANIORA
Jurnal pengabdian Masyarakat
• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm

memiliki banyak pulau, dimana 70 persen wilayahnya adalah laut, menjadikan banyak wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut atau desa-desa yang memiliki pantai. Kondisi alam dan letak wilayah membuat desa pesisir bercirikan sebagai daerah pemukiman padat, sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa pesisir menggantungkan mata pencahariannya pada laut atau sebagai nelayan. Hasil Sensus Desa (PODES), menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah desa di Indonesia sebanyak 78.609 desa, di antaranya terdapat 11.884 desa (15,12 persen) di desa maritim yang dekat dengan desa pesisir, yaitu yang memiliki pantai atau berbatasan dengan laut. Ada 66.725 desa yang bukan desa pesisir atau sekitar 84,88 persen. Dasar hukum otonomi daerah pertama kali disahkan dengan UU No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU no. 32 Tahun 2004. Sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut, pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru di Indonesia atau pembentukan daerah administrasi baru di tingkat kabupaten/kota dari induknya semakin meluas. Pemekaran wilayah tidak hanya di tingkat kabupaten/kota tetapi juga di tingkat kecamatan bahkan di tingkat desa, dalam 3 tahun pendataan Podes berikutnya jumlah desa telah mencapai 82.190 desa, bertambah 3.581 desa atau meningkat sekitar 81,27 persen. Jumlah desa pesisir dari hasil PODES 2014 tercatat sebanyak 12.827 desa, dalam kurun waktu tiga tahun terjadi pemekaran beberapa desa sehingga terjadi penambahan 943 desa pesisir. Sedangkan desa non pesisir mencapai 69.363 desa, terjadi penambahan 2.638 desa dalam kurun waktu tiga tahun. Dalam kurun waktu 3 tahun, pada pendataan Podes berikutnya jumlah desa mencapai 82.190 desa, terdapat penambahan 3.581 desa atau meningkat sekitar 81,27 persen. Jumlah desa pesisir dari hasil PODES 2014 tercatat sebanyak 12.827 desa, dalam kurun waktu tiga tahun terjadi pemekaran beberapa desa sehingga terjadi penambahan 943 desa pesisir. Sedangkan desa non pesisir mencapai 69.363 desa, terjadi penambahan 2.638 desa dalam kurun waktu tiga tahun. Dalam kurun waktu 3 tahun, pada pendataan Podes berikutnya jumlah desa mencapai 82.190 desa, terdapat penambahan 3.581 desa atau meningkat sekitar 81,27 persen. Jumlah desa pesisir dari hasil PODES 2014 tercatat sebanyak 12.827 desa, dalam kurun waktu tiga tahun terjadi pemekaran beberapa desa sehingga terjadi penambahan 943 desa pesisir. Sementara jumlah desa non pesisir mencapai 69.363 desa, terjadi penambahan 2.638 desa dalam kurun waktu tiga tahun (BPS-RI, 2015).

Pembangunan Desa Ponipingan Menjadi Desa Mandiri Maritim. Menurut Rukin (2015), pembangunan maritim mencakup berbagai komponen antara lain pembangunan ekonomi, peningkatan pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang memadai. Pemberdayaan harus dilakukan berdasarkan aspek manfaat, kebutuhan, dan ketersediaan potensi yang ada, sehingga mampu mengubah pola pikir masyarakat dalam melakukan pola perubahan secara bertahap. Pemberdayaan sebenarnya membutuhkan pendampingan sampai tercapai kemandirian masyarakat. Dari pengolahan awal ketersediaan potensi di desa hingga tahap selanjutnya hingga tahap pemasaran, masyarakat membutuhkan pendampingan yang serius dan berkualitas. Sehingga tujuan pembangunan kemandirian masyarakat dan desa/pesisir tercapai dengan baik.

Pembangunan desa bahari merupakan sebuah gagasan baru yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi perkembangan dan kemajuan desa-desa di Indonesia di wilayah pesisir/pesisir. Dan jika kita ingin Indonesia menjadi pusat maritim di Asia Tenggara, maka pembangunan akan dilakukan. Pemerintah tidak hanya fokus pada wilayah Pesisir/Pantai tetapi juga harus berorientasi pada wilayah Pesisir, laut dan darat karena saling berhubungan

AKUNTANSI HUMANIORA
Jurnal pengabdian Masyarakat
• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm

satu sama lain. Pembangunan desa bahari sendiri dapat dilakukan apabila terpenuhinya faktor-faktor pendukung terselenggaranya pembangunan desa bahari, antara lain:

- Transportasi yang memadai,
- Adanya sumber daya manusia yang berkualitas,
- Ada fokus pembangunan mulai dari desa ke kota, dan membuka kota kemudian ke desa,
- Pemberdayaan dan peningkatan infrastruktur merupakan sarana utama dalam pembangunan masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir desa Ponipingan termasuk dalam kategori kurang beruntung dan perlu penanganan serius dari pemerintah. Program pengembangan praktik terbaik diperlukan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Demikian pula pembangunan yang tepat sasaran dan tepat sasaran merupakan kunci awal yang perlu dilakukan dan dikembangkan sebagai upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Desa-desa di pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikembangkan sesuai dengan potensinya.

Program pembangunan desa bahari pada dasarnya merupakan proses perubahan, pembangunan dan kemajuan dalam berbagai aspek yang ada di desa-desa di wilayah pesisir/pesisir dan desa-desa di pulau-pulau kecil di Indonesia. Pembangunan yang dilakukan harus bersifat menyeluruh yaitu pengelolaan sumber daya alam pesisir yang berorientasi pada pantai, laut dan darat karena semuanya saling berhubungan satu sama lain. Pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pengembangan beberapa sektor penting bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Agar desa maritim bisa mandiri, otomatis desa di pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan pembangunan yang komprehensif terutama perekonomian daerah agar masyarakat desa pesisir tidak lagi miskin dan bisa mandiri.

Pemerintah mampu mempersiapkan sumber daya manusia di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil dengan keterampilan dan pelatihan yang memungkinkan mereka mengelola sumber daya alam pesisir dan laut yang pada gilirannya dapat berjalan secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir itu sendiri. Beberapa sektor penting yang harus dikembangkan pemerintah di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil adalah;

1) Pemerintah perlu menata dana desa sesuai dengan undang-undang desa yang berlaku, termasuk perlunya membentuk koperasi desa sebagai upaya pemerintah untuk mengusir para rentenir atau tengkulak yang telah memiskinkan nelayan.
2) Perlu dibangun infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan atau dermaga kecil sebagai akses transportasi perdagangan antar pulau dan ke kota. Pelabuhan ini juga menjadi akses untuk kebutuhan logistik lainnya.
3) Pembangunan fasilitas fasilitas kesehatan dan pendidikan, kedua fasilitas ini sangat mendasar dan harus menjadi kewajiban pemerintah agar setiap desa memiliki fasilitas tersebut. Fasilitas kesehatan di desa sangat penting, karena banyaknya kematian di pulau-pulau kecil terpencil juga disebabkan oleh kurangnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan dokter. Sedangkan sarana pendidikan merupakan sarana untuk menghasilkan generasi manusia yang berpikir lebih maju dan mandiri.

Ketiga poin di atas harus menjadi prioritas dalam membangun desa-desa di pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, jika terwujud maka desa tidak akan sepi, dan desa tidak akan ditinggalkan lagi oleh masyarakat yang pindah ke kota. Namun, desa tersebut menjadi hidup,

AKUNTANSI HUMANIORA
Jurnal pengabdian Masyarakat
• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm

maju dan mandiri karena dikelola oleh rakyatnya sendiri. Kemudian desa-desa pesisir dan desa-desa di pulau-pulau kecil dan terdepan akan menjadi jalur utama mewujudkan poros maritim.

Internalisasi Sistem Integrasi "Desa Mandiri Maritim" di Desa Ponipingan. Wilayah pesisir Indonesia yang merupakan negara kepulauan merupakan wilayah yang berkembang pesat, mengingat wilayah pesisir sangat mudah dijangkau dan dapat memberikan ruang yang relatif murah dibandingkan dengan daratan. Oleh karena itu, pantai tunduk pada migrasi. Hampir 60% dari 4.444 penduduk kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar terkonsentrasi di wilayah pesisir (Adibroto, 1999: 125; Dahuri, dkk., 2001; Burbridge, 1988). Secara umum, kota pesisir di Indonesia memiliki berbagai peran, antara lain sebagai penyedia potensi sumber daya alam, kawasan industri dan pelabuhan, perikanan, pariwisata, dan pemukiman. Selain itu, sebagian besar kota di Indonesia terletak di wilayah pesisir karena akses dan koneksi yang mudah antara pulau dan wilayah. Oleh karena itu, pengelolaan pesisir merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung pembangunan Indonesia. Sistem integrasi "Desa Mandiri Maritim" mengakui pengelolaan pesisir dalam bentuk kebijakan yang terdiri dari kerangka kelembagaan dan kewenangan hukum yang diperlukan untuk pengembangan dan perencanaan pengelolaan pesisir, dan tujuan lingkungan sektoral yang komprehensif yang ditetapkan dalam sistem integrasi nanti.

Sistem integrasi "Desa Mandiri Bahari" ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pesisir dan meminimalkan dampak negatif pengelolaan pesisir baik terhadap sumber daya alam maupun lingkungan. Sistem integrasi seperti ini sebenarnya sudah ada sejak lama sebagai Integrated Coastal Zone Management (ICZM), pertama kali diusulkan pada Konferensi Pesisir Dunia di Belanda pada tahun 1993. Dalam forum ini, PWPT ditetapkan sebagai proses yang paling tepat terkait dengan pengelolaan pesisir. masalah. , baik keprihatinan saat ini maupun jangka panjang, meliputi: habitat, penurunan kualitas air akibat polusi, perubahan siklus air, hilangnya sumber daya pesisir, kenaikan permukaan laut dan dampak perubahan iklim secara global (perubahan iklim). Konsep PWPT adalah untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan dalam pengelolaan pesisir, seperti konflik kepentingan, kurangnya prioritas, kepastian hukum, kurangnya pengetahuan tentang posisi daerah dan faktor sosial lainnya, menyatakan bahwa perencanaan yang tepat. dan kerangka manajemen untuk. Kurangnya informasi dan sumber daya.

Internalisasi Desa Mandiri Bahari di Desa Ponipingan secara khusus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintah desa, karena keberadaan masyarakat umum harus diinternalisasikan dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. Faktor kemitraan perlu dikembangkan di antara semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Komponen yang terlibat dalam kemitraan pengelolaan pesisir meliputi masyarakat desa Ponipingan, pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, media massa, swasta, donor, organisasi internasional dan komunitas ilmiah. Beberapa aspek yang mempengaruhi masyarakat Desa Ponipingan menjadi motor penggerak status dan keberadaan kawasan pesisir. Pengelolaan berbasis masyarakat setidaknya memiliki empat manfaat. (1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya di sekitarnya, (2) Dukungan masyarakat luas dalam mengelola sumber daya yang ada, (3) Tersedianya data yang dibutuhkan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, dan (4) pengelolaan sumber

AKUNTANSI HUMANIORA
Jurnal pengabdian Masyarakat
• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm

daya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Untuk mencapai manfaat tersebut, beberapa kegiatan stimulasi dilakukan di desa Ponipingan, antara lain:

1) Terbentuknya sistem terpadu "Desa Mandiri Maritim" dan pengelolaan sampah laut sebagai wujud Ketahanan Maritim di Desa Pesisir Ponipingan. Program ini berhasil dicapai melalui kerjasama antara pengawas lapangan, mahasiswa dan pemerintah desa. Dimulai dengan diskusi pemetaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa dan ditindaklanjuti dengan pembentukan organisasi kepemudaan yang belum terbentuk dan pelibatan perempuan dari kelompok pengajian untuk memobilisasi perempuan TP PKK desa. Materi muatan yang dimaksud dalam sistem integrasi meliputi: Pelibatan pemangku kepentingan di bidang kelautan, perikanan, dan keamanan laut. Dalam penyuluhan keamanan maritim, mahasiswa mengundang pihak dari Babinkamtibmas untuk memberikan sosialisasi tentang ancaman bencana alam, aspek keamanan TNI hingga jaminan sosial masyarakat pesisir baik di laut maupun di darat. Membuat Baseline yang ada di Desa Ponipingan yang dirangkum dari hasil survey awal oleh siswa, terdiri dari:
   a) Status sosial ekonomi yang mengumpulkan informasi demografis berbasis rumah tangga
   b) Jenis kegiatan produktif rumah tangga
   c) Praktek penangkapan ikan domestik
   d) Sikap penduduk terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir di desa ponipingan
   e) Sensus jenis ikan dan kondisi terumbu karang
   - Pemberdayaan perempuan dari kelompok pengajian yang merupakan kelompok sosial terbesar di desa Ponipingan, menjadi kelompok perempuan nelayan yang juga ditentukan langsung oleh kepala desa
   - Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS Besar) Percontohan oleh mahasiswa KKN Pengabdian Masyarakat Desa Ponipingan sebagai tempat pemilahan sampah daur ulang baik yang berasal dari laut maupun yang dihasilkan oleh masyarakat.
2) Pelatihan pengelolaan sampah laut berbasis Ecobrick

   Pelatihan pengelolaan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin jenis sampah organik di lingkungan pesisir dan lingkar dalam desa. Sampah plastik hingga bahan dan peralatan dikumpulkan, kemudian siswa mendemonstrasikan cara membuat sofa dari sampah di depan forum yang sebagian besar adalah kelompok pengajian. Selain diikuti oleh sebagian besar ibu-ibu dari kelompok pengajian, kegiatan pelatihan juga dihadiri oleh aparat desa dan masyarakat bahkan anak-anak di lingkungan desa Ponipingan.
3) Penyuluhan dan pelatihan pengolahan komoditas unggulan hasil laut dan pertanian menjadi bahan pangan untuk mencegah stunting

   Penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan mengolah jagung menjadi jajanan yang dapat dikonsumsi oleh anak usia dini dengan melibatkan ibu-ibu dari kelompok PKK desa bekerjasama dengan mahasiswa KKN.

AKUNTANSI HUMANIORA
Jurnal pengabdian Masyarakat
• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm

KESIMPULAN

Kapasitas desa dari masyarakat hingga perangkat desa perlu dioptimalkan perannya. Desa pesisir adalah desa yang tipologi wilayahnya unik, berbeda dengan kebanyakan wilayah desa lainnya. Oleh karena itu, desa perlu memiliki ketahanan yang kuat, baik dari aspek pencegahan bencana alam, aspek ketahanan lingkungan, hingga ketahanan sosial budaya dan ekonomi. Ketahanan ini dibentuk dengan mengoptimalkan kapasitas desa itu sendiri. Pengelolaan sampah dan limbah laut hanyalah salah satu pendekatan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemauan masyarakat dalam membangun desa. Namun aspek yang paling strategis dan penting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan desa, baik dengan tidak membuang sampah sembarangan atau mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat atau memiliki nilai jual ekonomis. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja sinergis antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa Ponipingan dan seluruh masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa yang lebih tangguh, bersih dan sehat. Kegiatan yang dilakukan hanya stimulus yang memperkuat sumber daya yang dimiliki desa Ponipingan, baik sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang gotong royong maupun tata kelola yang kuat khas masyarakat adat pesisir. Hal ini mendukung upaya kemandirian seluruh masyarakat untuk mengembangkan desanya menjadi “Desa Mandiri Bahari”. Kegiatan yang dilakukan hanya stimulus yang memperkuat sumber daya yang dimiliki desa Ponipingan, baik sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang gotong royong maupun tata kelola yang kuat khas masyarakat adat pesisir. Hal ini mendukung upaya kemandirian seluruh masyarakat untuk mengembangkan desanya menjadi “Desa Mandiri Bahari”. Kegiatan yang dilakukan hanya stimulus yang memperkuat sumber daya yang dimiliki desa Ponipingan, baik sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang gotong royong maupun tata kelola yang kuat khas masyarakat adat pesisir. Hal ini mendukung upaya kemandirian seluruh masyarakat untuk mengembangkan desanya menjadi “Desa Mandiri Bahari”.

DAFTAR PUSTAKA

KKP, DP (2012). Guidelines for Compiling Coastal Village profiles. Jakarta: Director General of Marine and Coastal Affairs
Small Islands.
WikipediaIndonesia. (2020). Ponipingan, Bunobogu, Buol. Taken May 14, 2022, from https://gor.wikipedia.org/wiki/Ponipingan,_Bunobogu,_Buol
LPPM-UNG. (2022). Buol Maritime Service Community Service Report. Gorontalo: LPPM UNG.
BPSKab-Buol. (2022). Census data. Buol: BPS Buol Regency.
Kay, d. A. (2016). Taken back from https://www.duniapengertian.com/2016/04/pengertian-definisi-region-pesisir.html?m=1
Divination, S. (2021). Many Threats, Indonesia Needs True Maritime Resilience This article was published on the SINDOnews.com page on Friday, 19 February 2021 - 22:58 WIB by Suparjo Forecast with the title "Many Threats, Indonesia Needs True Maritime Resilience. Taken back from SINDO News: https://ekbis.sindonews.com/read/340896/34/banyak-ancaman-indonesia- need-ketahanan-maritim-yang-sejati-1613746975

AKUNTANSI HUMANIORA
Jurnal pengabdian Masyarakat
• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm

my dataDIY. (2020). SDGs 14 Protecting Marine Ecosystems. Taken May 14, 2022, from http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/14-menjaga-ekosistem-laut
BPS-RI. (2015). Maritime Village Studies. Jakarta: Central BPS Indonesia.